

**SURAT KEPUTUSAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
Jl.dr. Muwardi No.66 Gayam Sukoharjo
Nomor Telpn (0271) 593015-593561 Sukoharjo



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.(0271) 593015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440/ 263 / I / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

13.Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO



TRI TUTI RAHAYU

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun					
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	95.00 Per 100.000 KH	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Cakupan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	112.497.173.534	Dinas Kesehatan
2		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7.20 Per 1000 KH		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		
3		Angka Kematian Balita (AKBa)	8.40 Per 1000 KH	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	52.210.000	
4		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	95,00 %	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	108.957.286.000	
5		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	66,00 %	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	131.400.000	
6		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	Persentase Stunting	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian administrasi kepegawaian	100 Persen	603.862.500	
7					Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		
8				1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250 %	476.606.300	
9				1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	592.825.000	
10					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		
11				1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250 %	1.227.313.000	
12				1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250 %	455.670.734	
15				1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	40 %	74.414.670.357	Dinas Kesehatan
16					Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	100 %		
17					Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	100 %		
18					Persentase Capaian UHC	90 %		
19		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	50 %					

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.00 angka		Persentase Fasyankes yang memberikan Layanan JKN	50 %		
21					Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	60 %		
22					Persentase FKTP terakreditasi	28 %		
23					Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	100 %		
24					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	67 %		
25					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	78 %		
26					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olahraga	100 %		
27					Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi	100 %		
28					Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%		
29					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100 %		
30					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100 %		
31					Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	100 %		
32					Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	100 %		
33					Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100 %		
34					Presentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	100 %		
35					Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%		
36				1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan obat dan BMHP (SDK)	100 %	16.828.968.220	
37					Pengembangan Puskesmas	100 %		
38					presentase ketersediaan alat kesehatan	35 %		
39					Persentase Tersusunnya DED	100 %		
40				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100 %	57.430.202.137	
41					Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	32 %		
42					Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	60 %		
43					Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	80 %		
44							Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	
45	Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	100 %						

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46					Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	90 %		
47					Persentase Pasien HIV/AIDS mendapatkan pemeriksaan standar	100 %		
48					Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	100 %		
49					Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	100 %		
50					Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	98 %		
51					Imunisasi dasar lengkap	95 %		
52					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	100 %		
53					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %		
54					Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100 %		
55					Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	100 %		
56					Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6)	100 %		
57					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %		
58					Persentase kunjungan Bayi baru lahir	100 %		
59					Persentase pelayanan anak balita (Kesehatan Masyarakat)	100 %		
60					Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100 %		
61					Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	7 %		
62					Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	12 %		
63					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	100 %		
64					Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	45 %		
65					Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	55 %		
66					Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	100 %		
67					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Kesehatan Masyarakat)	25 %		
68					Persentase pelayanan anak balita (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	%		
69					Persentase pengelolaan upaya kesehatan khusus (Kesehatan Masyarakat)	%		
70					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 Dokumen		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71					Persentase pengelolaan upaya kesehatan khusus (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	%		
72					Operasional puskesmas sesuai standar			
73					Jumlah Dokumen Media Promosi Kesehatan	6 Dokumen		
74					sanggar inklusi melakukan pelayanan kesehatan Ásioterapi/rehabilitasi	144 sanggar/bln		
75					Pendampingan dan bimbingan teknis program pencegahan dan pengendalian penyakit prioritas nasional serta penyehatan lingkungan di Puskesmas (BOK)	12 kali		
76					Persentase jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100 %		
77					Jumlah Dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	14 Dokumen		
78					Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	50.410 Orang		
79					Pembinaan, supervisi, bintek, monitoring	11 kali		
80					jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart { P2P}	48.700 Orang		
81					Surveilans aktif Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya (BOK)	69 kali		
82					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		
83					Pendampingan calon jemaah haji ke embarkasi/penjemputan jemaah haji dari debarkasi	2 Kali		
84					Pendampingan rujukan oleh petugas puskesmas	1 Kali		
85					Sosialisasi persiapan keberangkatan calon jemaah haji	1 Kali		
86					Pengendalian faktor resiko jemaah haji (suveilans K3JH)	1 Kali		
87					Monitoring dan Verifikasi STBM	12 KALI		
88					Pembinaan Pengelolaan Tempat Tempat Umum	1 kali		
89					Pendampingan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum dan Fasyankes (BOK)	4 Kali		
90					Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Kali		
91					Pelaksanaan senam kesehatan bagi karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	44 Kali		

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab			
						Target Kinerja	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
92					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	100 %					
93					Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau potensi Bencana	100 %					
94					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	100 %					
95					Persentase pelayanan Kesehatan Gizi bagi Masyarakat	100 %					
96					Persentase puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu, kesehatan bayi, balita, lansia	100 %					
97					Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	100 %					
98					1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan izin			100 %	155.500.000	
99					Presentase Capaian UHC	90 %					
100						1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)		100 %	1.357.408.600	Dinas Kesehatan
101							Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)		100 %		
102				1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindaklanjut Perizinan Tenaga Kesehatan	100 %	26.669.600				
103				1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	95 Persen	41.600.000				
104					Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM sesuai kebutuhan	100 %					
105					Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota (RSUD)	100 %					
106				1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	1.289.139.000				
107					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85 %					
108						1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan		81 %	622.163.400	Dinas Kesehatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Penanggungjawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109				1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))memiliki izin operasional yang masih aktif.	100 %	202.217.800	
110				1.02.04.2.03 - Penerbitan SertiĀkat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase Sarana IRT baru yang dapat diterbitkan SPPIRT sesuai ketentuan	100 %	203.730.000	
111				1.02.04.2.04 - Penerbitan SertiĀkat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sarana TPM yang diterbitkan SertiĀkat Laik Higiene	100 %	17.630.000	
113				1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah sarana IRT berSPPIRT yang dibinwas	62 %	198.585.600	
114				1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	47 63%	5.382.798.800	Dinas Kesehatan
115				1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (KesMas)	32 %	474.785.000	
116					Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan	100 %		
117				1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	97 %	116.547.000	
118				1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	56 %	4.791.466.800	

Sukoharjo, 4 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan



 TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes

 NIP. 197009021991032005